



## Bingkai Sara Dalam Berita Politik: Analisis *Framing* Berita Pengangkatan Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan RI

Dzulfikar Ahmad<sup>1</sup>, Guntur Freddy Prisanto<sup>2</sup>, Niken Febrina Ernungtyas<sup>3</sup>,  
Sekartaji Anisa Putri<sup>4</sup>

<sup>1234</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi InterStudi, Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup>sangkhalil@gmail.com, <sup>2</sup>guntur@stikom.interstudi.edu, <sup>3</sup>niken@stikom.interstudi.edu,

<sup>4</sup>sekartajianisa@gmail.com

### **Keywords :**

Entman framing,  
news framing  
analysis, political  
news, SARA  
Frame, SARA  
politics.

### **Abstract**

*The sensitive issue of SARA is widely used in the political world. Both by politicians themselves and by the media. One of the uses of SARA issues in political news by the media is as a frame. Framing in political news has a negative tendency to overthrow a politician not far from the value of SARA as a minority. The framing of political news about SARA is examined in this study. This research examines the SARA frame in the news of Prabowo's appointment as the Indonesian defense minister. News that is the object of research are those published online by major media on their websites from 21 October 2019 to 27 October 2019. Namely since Prabowo was invited to the presidential palace until a week he served as the Indonesian defense minister. The research findings show that most of the news that is the object of the research has a Reject Prabowo frame.*

### **Kata Kunci :**

Analisis framing  
berita, berita  
politik, bingkai  
SARA, framing  
model Entman,  
politik SARA.

### **Abstrak**

Isu SARA yang sensitif banyak dimanfaatkan dalam dunia politik. Baik oleh politikus itu sendiri maupun oleh media. Penggunaan isu SARA dalam berita politik oleh media salah satunya ialah sebagai bingkai. Pembingkai dalam berita politik bertendensi negatif untuk menjatuhkan seorang politikus tak jauh dari nilai SARA sebagai minoritas. Pembingkai berita politik berbau SARA diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini meneliti bagaimana bingkai SARA dalam berita pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan RI. Berita yang menjadi objek penelitian ialah yang dipublikasi secara daring oleh media besar dalam website mereka sejak 21 Oktober 2019 hingga 27 Oktober 2019. Yaitu sejak Prabowo diundang ke istana kepresidenan hingga seminggu ia menjabat sebagai menteri pertahanan RI. Temuan penelitian menunjukkan sebagian besar berita yang menjadi objek penelitian memiliki bingkai Tolak Prabowo.

## **Pendahuluan**

Fakta bahwa penduduk dunia terdiri dari beragam suku, ras, golongan, maupun agama (SARA) membuat manusia tidak dapat menghindari hidup dalam keberagaman. Tiap-tiap negara di dunia memiliki keberagamannya tersendiri. Adanya keberagaman suku, ras, golongan, maupun agama dapat memperkaya sebuah negara maupun menimbulkan masalah di dalamnya. Dalam dunia politik, hal tersebut pun berlaku. Suku, ras, golongan, dan agama dapat digunakan sebagai hal positif untuk memersatukan pilihan politik serta menaikkan dukungan untuk seorang politikus, maupun sebaliknya. Hal tersebut juga dapat digunakan untuk menjatuhkan sosok seorang politikus, meniadakan dukungan untuk pihak lawan, mengadu domba, dan banyak hal lainnya. Kancah politik dunia sekan tak bisa lepas dari isu SARA. Layaknya Barrack Obama ketika menjabat menjadi presiden Amerika pun tak lepas dari pemberitaan dengan pembedaan SARA (Ramasubramanian & Martinez, 2017).

Tokoh-tokoh politik dunia seperti Obama akan digali berbagai aspek identitas budaya dan latar belakangnya meliputi suku, agama, ras, maupun golongan yang dimiliki oleh media jurnalistik untuk dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi. Media sering kali mengaitkan identitas budaya seorang dengan perilaku maupun keputusan yang diambil oleh orang tersebut. Penulisan berita dengan teknik pembedaan (framing) yang dilakukan oleh media terkait identitas budaya yang berujung pada pembedaan berbau SARA sendiri merupakan unsur kebudayaan yang dianut. Budaya akan memengaruhi bagaimana pemimpin politik dan wartawan melakukan framing serta bagaimana pembaca akan memaknai framing (Matthes, 2012). Pandangan stereotip bahwa seorang individu dinilai dari latar belakang budaya yang dimiliki bukan dari nilai diri yang dimiliki oleh individu masih begitu melekat dalam budaya politik. Budaya politik dunia, termasuk Indonesia, masih menganut pandangan tersebut.

Adanya pandangan seperti di atas akan terus melanggengkan politik SARA. Dengan begitu, pemberitaan berbau SARA pun tak akan lekas hilang dari media massa. Di Indonesia sendiri, beragam peristiwa politik yang dibumbui oleh nilai SARA menjadi topik yang begitu panas dan menyita perhatian berbagai kalangan masyarakat. Kasus seperti pemimpin dari golongan minoritas, pemimpin dengan agama mayoritas ramai dibicarakan dan memicu beragam aksi di Indonesia. Kasus politik yang lekat dengan isu SARA sendiri memicu beragam reaksi dari media dalam melakukan pembedaan (Nasution & Aminulloh, 2018; Mayasari, 2017; Atmadja, 2014). Pembedaan negatif

maupun positif dimunculkan oleh media-media Indonesia. Pemilihan arah sebuah bingkai akan menjadi negatif maupun positif oleh media bukan semata-mata berdasarkan peristiwa yang terjadi, namun dipilih berdasarkan keberpihakan politik pemilik media (Nasution & Aminulloh, 2018; Mayasari, 2017). Media sebagai sarana penyebaran informasi kini tak lagi netral. Keberpihakan politik dari media-media besar perlu disadari agar pembaca tidak mudah terprovokasi. Adanya fenomena seperti ini membuat framing bukan lagi sekadar prosedur pembedaan biasa, namun dapat menjadi senjata dari pihak-pihak dengan kepentingan politik tertentu.

Salah satu contoh kasus bagaimana framing yang dilakukan oleh media di Indonesia mengandung unsur kepentingan dari pemilik modal terkait peristiwa politik dapat dilihat pada kasus penayangan quick count hasil pemilihan umum presiden 2014. Masing-masing media menampilkan pasangan calon yang mereka dukung sebagai pemenang pemilihan umum presiden 2014 versi quick count. TV One menampilkan bahwa Prabowo-Hatta ialah pemenang pemilihan umum presiden 2014 sedangkan Metro TV menampilkan Jokowi-JK sebagai pemenang (Anggoro, 2014). Adanya keberpihakan dan kepentingan politik yang dimiliki oleh pemilik media menjadikan peliputan berita tak lagi mengedepankan fakta dan hasil verifikasi nyata. Namun media berlomba untuk menyuarakan pilihan sang pemilik. Berita yang tidak teruji kebenarannya dan bertolak belakang dapat menimbulkan risiko perpecahan di masyarakat. Seharusnya media bersikap bijak dan tidak menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki.

Sebaran berita yang provokatif dengan penggiringan opini dan agenda/ tujuan tertentu dapat menyebabkan kerusuhan massal. Apalagi ketika dikaitkan dengan isu SARA yang sensitif dan mudah memunculkan konflik serta keresahan di kalangan masyarakat luas. Kondisi politik yang panas ditambah dengan isu SARA akan menjadi perhatian khalayak luas. Peristiwa politik yang terkait dengan pemerintahan tak lepas dari isu-isu SARA. Indonesia sebagai negara yang memiliki ragam suku, agama, ras, dan golongan tentunya tidak lepas dari kasus-kasus berbau SARA. Sepanjang sejarah Indonesia, beberapa kali kejadian besar di dalam pemerintahan melibatkan kasus SARA yang menjadi perhatian masyarakat luas. Politik kekuasaan di Indonesia tak jarang memanfaatkan isu SARA untuk menarik hati massa pendukungnya. Namun tak jarang juga dimanfaatkan untuk menjatuhkan individu maupun pemerintahan.

Adanya penelitian terkait framing dapat membantu membuka pandangan masyarakat sebagai pembaca/ konsumen media terhadap kondisi media saat ini. Pembaca

perlu mengetahui hal tersebut agar dapat menghindari dampak negatif dari proses membaca berita berbingkai tanpa menyadari pembingkaiian yang ada. Efek dari framing dapat memengaruhi pola pikir pembaca, menggiring opini, pada tingkat paling tinggi dapat memengaruhi perilaku. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian Ramasubramanian & Martinez (2017) terkait tanggapan pembaca terhadap berita Obama. Ketika ada berita dengan bingkai negatif yang berbau stereotip maupun rasial, dapat memunculkan persepsi dan perilaku stereotip serta rasial dalam diri pembaca. Framing juga memiliki efek untuk memobilisasi massa dan menggiring pembaca kepada memori tertentu (Eriyanto, 2011).

Perjalanan politik kepemimpinan di Indonesia hampir selalu diiringi dengan beragam isu SARA. Pemilihan pasangan presiden hingga menteri di tahun 2019 pun diiringi dengan hal-hal tersebut. Peristiwa pemilihan menteri era Jokowi-Ma'ruf pun menjadi semakin disoroti. Prabowo yang merupakan rival Jokowi dalam dua periode berturut-turut kini menjadi menteri pertahanan Republik Indonesia. Prabowo melakukan serah terima jabatan menteri pada tanggal 24 Oktober 2019 (Kemhan, 2019). Peristiwa dipilih dan dilantikannya Prabowo sebagai menteri pertahanan RI menuai beragam respon baik dari media, politikus, maupun masyarakat. Berita terkait dilantikannya Prabowo sebagai menteri pertahanan RI pun tak lepas dari isu SARA. Adanya peristiwa ini membuat peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam bagaimana pembingkaiian berita-berita online yang dipublikasikan oleh media mainstream terkait peristiwa tersebut. Untuk itu, penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana framing yang dilakukan oleh media mainstream dalam pemberitaan online atas dilantikannya Prabowo sebagai menteri pertahanan Republik Indonesia.

Penelitian dengan metode framing ini diharapkan berguna untuk membuka wawasan pembaca terkait media mainstream dalam kancah politik. Beberapa media mainstream di Indonesia kini masuk dalam lingkaran politik kekuasaan. Media dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan politik dari pemiliknya. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca awam dapat mengetahui bahwa media di Indonesia tak seluruhnya netral dalam kaitannya dengan preferensi politik tanah air. Beberapa media bahkan memiliki kecondongan politiknya sendiri. Isu-isu SARA yang diangkat oleh media dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar dari kepentingan publik yang seharusnya menjadi esensi utama jurnalisisme. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbangkan implikasi teoritis dalam bidang ilmu yang berkaitan.

## Metode

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian teks kualitatif. Jenis dari penelitian teks ini ialah framing model Robert M. Entman. Teks yang menjadi objek penelitian ini ialah berita online yang dipublikasikan oleh portal berita online resmi terkait pelantikan/pengangkatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI. Untuk membatasi jumlah objek penelitian, berita online yang dianalisis dalam penelitian ini hanya berita dalam media online mainstream yang dipublikasi dalam kurun waktu 21-27 Oktober 2019. Pemilihan batasan waktu tersebut dilandaskan pada waktu terjadinya peristiwa. Mulai 21 Oktober 2019 sejak Prabowo diundang ke istana kepresidenan hingga 27 Oktober 2019 ketika Prabowo sudah melalui minggu pertama mengemban tugas sebagai menteri pertahanan RI. Proses pengumpulan data dalam penelitian ialah dengan melakukan pencarian berita online melalui google search dengan kata kunci Prabowo Menteri Pertahanan RI serta membatasi jangka waktu sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan.

Hasil pencarian tersebut memunculkan total 11 halaman berita. Dari 11 halaman yang ada, terdapat 109 Link berita utama. Peneliti membatasi pada 3 halaman pertama. Tiga halaman pertama menjadi sampel penelitian dikarenakan halaman-halaman tersebut lah yang paling mungkin diakses oleh pengguna. Dari total seluruh berita yang ada pada halaman utama, berita kemudian disaring lagi hingga mendapatkan objek penelitian yang tepat. Berita yang kemudian diambil sebagai objek penelitian ialah yang memiliki kata kunci terkait SARA, yaitu pelaku kejahatan HAM dan kejadian mei 1998. Pada halaman pertama yang memiliki total 30 berita terkait Prabowo sebagai menteri pertahanan RI, terdapat 5 berita yang memuat kata kunci SARA. Kemudian pada halaman kedua terdapat total 29 berita dengan 5 berkata kunci SARA. Terakhir, pada halaman ketiga total 21 artikel dengan 2 berita berkata kunci SARA. Sehingga didapatkan 12 artikel yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut.

12 Objek penelitian di atas akan dianalisis sesuai dengan tahapan analisis framing model Entman. Entman (2004) menyatakan terdapat empat tahapan dasar pembingkaiian berita kejadian politik. Keempat tahapan tersebut ialah defining effects or conditions as problematic, identifying causes, conveying a moral judgement, dan endorsing remedies or improvements (Entman, 2004). Jadi untuk langkah pertama akan dilihat isu apa yang diangkat sebagai masalah utama dalam berita yang ada. Apa isu utama yang diangkat serta ditonjolkan dalam berita sebagai masalah. Masalah tersebut merupakan hal yang menjadi sorotan utama dalam peristiwa pengangkatan Prabowo sebagai menteri

pertahanan RI. Selanjutnya peneliti melakukan identifikasi penyebab masalah. Penyebab dalam hal ini dapat merupakan perilaku, kejadian, maupun aktor.

Setelah melakukan identifikasi penyebab terjadinya masalah, peneliti menelaah bagaimana penilaian moral yang dituliskan oleh jurnalis dalam berita. Yaitu bagaimana jurnalis mengartikan nilai moral dari masalah yang menjadi sorotan utama, apakah bernilai netral, positif, ataupun negatif. Terakhir, dalam tahapan analisis framing Entman peneliti menelaah solusi atau penyelesaian seperti apa yang direkomendasikan oleh jurnalis dalam pemberitaan pengangkatan Prabowo. Setelah melakukan analisis framing Entman terhadap seluruh objek penelitian, peneliti mengidentifikasi apakah pembingkai berita yang ada termasuk dalam kategori SARA atau bukan. Identifikasi berita yang membingkai dengan muatan SARA terlihat dari masalah yang diangkat serta kata kunci terkait suku, agama, ras, dan antar golongan. Kata kunci terkait SARA yang ditemukan dalam objek penelitian ini ialah pelaku kejahatan HAM dan kejadian Mei 1998. Dua kejadian tersebut merujuk pada isu SARA karena kejadian Mei 1998 yang dianggap lekat dengan sosok Prabowo merupakan peristiwa kejahatan terhadap golongan/ras tertentu di Indonesia. Setelah hasil analisis didapatkan, dilakukan pembahasan sesuai dengan teori dan penelitiannya sebelumnya.

### Hasil dan Pembahasan

Artikel-artikel berita mengenai pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan RI dengan kata kunci SARA yang terdapat di dalamnya ternyata memiliki bingkainya tersendiri. Tak seluruhnya membingkai dengan cara yang sama. Hasil temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa dari 12 artikel yang diteliti terdapat 10 artikel yang berfokus pada sosok Prabowo serta 2 artikel berfokus pada sosok maupun bahasan lain. Pada 10 artikel yang berfokus pada sosok Prabowo, terdapat 7 artikel dengan *tone* negatif, 2 artikel dengan *tone* netral, serta 1 artikel dengan *tone* positif. Berikut data temuan penelitian:

**Tabel 1 Temuan Penelitian (Hasil olah data peneliti, 2020)**

| No. | Media     | Tanggal Publikasi | Judul Berita   | Bingkai       | Tone    |
|-----|-----------|-------------------|--|---------------|---------|
| 1   | Wartakota | 22/10/2019        | Diminta Jadi Menteri, Prabowo Subianto Banjir Kritikan, Disebut Wibawa Jatuh | Tolak Prabowo | Negatif |

|    |           |            |  |                                  |         |
|----|-----------|------------|--|----------------------------------|---------|
|    |           |            | dan Tak Banyak Membantu  |                                  |         |
| 2  | BBC       | 23/10/2019 | Kabinet Jokowi 2019, Prabowo jadi menteri pertahanan, pengamat militer: Pandangannya 'berbahaya' | Tolak Prabowo                    | Negatif |
| 3  | BBC       | 24/10/2019 | Prabowo Subianto: 'Saya harus membantu Presiden Jokowi menjaga keamanan'                         | Kritik dan Harapan untuk Prabowo | Netral  |
| 4  | Tribun    | 26/10/2019 | Mahfud MD Angkat Bicara Bela Prabowo Tanggapi Banyaknya Penolakan Jadi Menteri Pertahanan        | Tolak Prabowo                    | Negatif |
| 5  | CNN       | 25/10/2019 | Mahfud Angkat Suara soal Kritik ke Prabowo di Kabinet Baru                                       | Lazimnya Kritik untuk Prabowo    | Positif |
| 6  | Liputan 6 | 23/10/2019 | Profil Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju                         | Perjalanan Karir Prabowo         | Netral  |
| 7  | CNN       | 25/10/2019 | YLBHI: Angkat Prabowo Jadi Menhan, Jokowi Jilat Ludah Sendiri                                    | Kinerja Jokowi                   | Negatif |
| 8  | Kompas    | 24/10/2019 | Prabowo Jadi Menhan, HAM Dinilai Hanya Jadi Komoditas Politik                                    | HAM sebagai Komoditas            | Negatif |
| 9  | Detik     | 24/10/2019 | Prabowo Jadi Menhan, Sumarsih: Semoga Pak Jokowi Tak Diculik                                     | Tolak Prabowo                    | Negatif |
| 10 | CNN       | 25/10/2019 | Tolak Prabowo, Keluarga Korban Minta Usut Kasus HAM Masa Lalu                                    | Tolak Prabowo                    | Negatif |
| 11 | Tirto     | 23/10/2019 | Suramnya Reformasi TNI jika Prabowo Menjabat Menteri Pertahanan                                  | Tolak Prabowo                    | Negatif |
| 12 | Detik     | 22/10/2019 | Bikin Aksi Tutup Mulut, Aktivis 98 Tolak Prabowo di Kabinet Jokowi                               | Tolak Prabowo                    | Negatif |

Dari tabel di atas ditemukan bahwa dalam berita berkata kunci Prabowo menteri pertahanan RI, pelaku kejahatan HAM, serta kejadian Mei 1998 tidak semuanya membingkai Prabowo sebagai topik utama. Seperti artikel berita berjudul *YLBHI: Angkat Prabowo Jadi Menhan, Jokowi Jilat Ludah Sendiri* yang diunggah CNN pada 25 Oktober 2019 dan *Prabowo Jadi Menhan, HAM Dinilai Hanya Jadi Komoditas Politik* yang diunggah oleh Kompas pada 24 Oktober 2019 yang mengaitkan isu Prabowo namun lebih menonjolkan kerangka utama mengenai kinerja Jokowi serta membahas HAM sebagai komoditas politik semata. Temuan di atas terlihat dari bagian *define problems* serta tiga tahap lainnya dalam analisis *framing* model Entman dari masing-masing artikel.

Empat tahap pembingkai model Entman (2004) yaitu *define problems*, *diagnose cause*, *make moral judgement*, serta *suggest remedies* akan menunjukkan bingkai sesungguhnya dari sebuah artikel. Judul artikel serta kata kunci yang terdapat di dalamnya tidak serta merta dapat menunjukkan apa bingkai yang dimiliki oleh artikel tersebut. Berikut temuan penelitian berdasarkan analisis empat tahap pembingkai model Entman:

**Tabel 2 Analisis Model Entman (Hasil olah data peneliti, 2020)**

| No | Media              | <i>Define Problems</i>  | <i>Diagnose Cause</i>  | <i>Make Moral Judgement</i>   | <i>Suggest Remedies</i>   |
|----|--------------------|---|--|---|---|
| 1  | Wartakota<br>22/10 | Banyaknya kritik untuk Prabowo                                      | Prabowo menerima ajakan lawan untuk bersatu dalam pemerintahan                           | Masuknya Prabowo dalam pemerintahan dinilai negatif untuk demokrasi | Lebih baik Prabowo tidak menerima tawaran untuk menjadi Menteri Jokowi            |
| 2  | BBC<br>23/10       | Prabowo dinilai tidak tepat untuk mengisi posisi Menteri Pertahanan | Pandangan & latar belakang Prabowo dianggap tidak sesuai untuk posisi Menteri Pertahanan | Prabowo diminta menjadi menteri karena nilai politik semata         | Sebaiknya Prabowo tidak menjadi menteri pertahanan                                |
| 3  | BBC<br>24/10       | Besarnya tugas Menhan yang diemban Prabowo                          | Menhan bertugas menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keamanan negara                        | Prabowo dinilai tidak tepat untuk menjadi menhan                    | Berharap Prabowo bekerja dengan baik walaupun ia bukan kandidat Menhan yang tepat |

|    |                    |  |  |   |   |
|----|--------------------|--|--|---|---|
| 4  | Tribun<br>26/10    | Banyaknya penolakan atas pengangkatan prabowo sebagai menteri pertahanan | Prabowo diduga terlibat kasus HAM berat di masa lalu   | Dugaan pelanggaran HAM tidak boleh disepelekan & harus ditindak | Presiden harus mengambil tindakan nyata dalam menyelesaikan kasus HAM, tidak mengangkat terduga pelanggar HAM ke dalam jajaran pemerintahan |
| 5  | CNN<br>25/10       | Kritik/ penolakan adalah hal yang lazim                                  | Terdapat juga penolakan/ kritik terhadap pengisi jabatan menteri lainnya                                       | Adanya kritik atau penolakan tidak memengaruhi kinerja          | Masalah harus diperbaiki ke arah yang benar   |
| 6  | Liputan 6<br>23/10 | Prabowo sang menteri pertahanan  | Prabowo diangkat menjadi menteri pertahanan oleh Jokowi  | Prabowo jenderal yang meredup                                   | Tidak ada   |
| 7  | CNN<br>25/10       | Jokowi tidak konsisten   | Jokowi mengangkat Prabowo sebagai menteri pertahanan   | Jokowi gagal dalam penegakan HAM                                | Pemberhentian Prabowo oleh Jokowi, kemudian mengangkat menteri yang bebas dari catatan kejahatan HAM  |
| 8  | Kompas<br>24/10    | HAM sebagai komoditas politik  | Mengkampanyekan penyelesaian kasus HAM namun mengangkat terduga pelanggar HAM berat sebagai menteri pertahanan | Jokowi tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan                | Jokowi seharusnya tidak memilih Prabowo sebagai menteri pertahanan  |
| 9  | Detik<br>24/10     | Kritik atas pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan              | Prabowo diduga terlibat pelanggaran HAM berat  | Pelanggar HAM tidak boleh lepas dari hukum                      | Jokowi harus menyelesaikan kasus pelanggaran HAM  |
| 10 | CNN<br>25/10       | Penolakan pengangkatan Prabowo   | Prabowo diduga terlibat pelanggaran HAM berat di masa lalu   | Pelanggaran HAM berat masa lalu                                 | Presiden mencabut surat   |

|    |                |  |                                       |   |  |
|----|----------------|--|---------------------------------------|---|--|
|    |                | sebagai menteri pertahanan   |                                       | harus diselesaikan                                    | pengangkatan Prabowo                                 |
| 11 | Tirto<br>23/10 | Suramnya reformasi jika Prabowo menjadi menteri pertahanan                     | Prabowo diduga pernah melanggar HAM   | Prabowo tidak boleh mengisi posisi Menteri Pertahanan | Prabowo harus menjalani sidang kasus pelanggaran HAM |
| 12 | Detik<br>22/10 | Ketidaksetujuan kalangan masyarakat atas masuknya Prabowo dalam Kabinet Jokowi | Prabowo dianggap pernah melanggar HAM | Prabowo harus dilawan                                 | Tolak prabowo demi tegaknya demokrasi                |

Dari temuan di atas dapat dilihat bahwa pada bagian *define problems* yang letaknya berada di awal artikel merupakan penekanan masalah yang kemudian akan dibahas. Bagian tersebut menjadi poin utama pembahasan. Selain bagian *define problems*, penekanan yang dilihat dalam sebuah artikel melalui analisis *framing* Entman adalah pada bagian *remedy* yang berada pada akhir artikel. Yaitu merupakan bagian ketika penulis artikel memberikan solusi dari masalah utama yang ada.

Artikel nomor tujuh dan delapan dalam tabel 2.0 di atas yang dipublikasikan oleh CNN pada 25 Oktober 2019 serta Kompas pada 24 Oktober 2019 memiliki bagian *define problems* yang tidak berfokus pada sosok Prabowo. Kemudian pada bagian *suggest remedies* meskipun menyarankan penurunan Prabowo, namun tetap ditujukan pada topik maupun sosok yang ada pada bagian *define problems*. Sehingga bingkai yang ada pada kedua artikel di atas bukan lah mengenai sosok Prabowo. Ketika pada bagian *define problems* dan *remedy* yang tidak ditunjukkan kepada sosok Jokowi maupun isu HAM sebagai komoditas politik, maka bingkai yang ada tidak berfokus pada sosok Prabowo. Meskipun isu pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan RI serta latar belakangnya sebagai terduga pelanggar HAM di masa lalu diikut sertakan dalam artikel. Hal ini sesuai dengan pernyataan Entman (2004) bahwa dua fungsi utama dari *framing* ialah *define problems* dan *remedy*.

Selain dua artikel yang telah disebutkan di atas, artikel lainnya memiliki bingkai dengan fokus utama sosok Prabowo. Dalam tabel 2.0, artikel nomor 5 yang dipublikasi oleh CNN pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan judul *Mahfud Angkat Suara soal Kritik ke Prabowo di Kabinet Baru* memiliki *tone* yang positif. Artikel tersebut pun melakukan pembingkai bahwa adanya kritik terhadap Prabowo adalah hal yang lazim atau umum

terjadi. Baik dalam bagian *define problems*, *diagnose cause*, serta *moral judgement* berdasarkan hasil analisis peneliti, seluruhnya memuat gagasan bahwa kritik adalah hal yang biasa dan juga dialami oleh menteri-menteri lainnya dan tidak memengaruhi kinerja menteri. Kinerja tak lantas menjadi buruk karena adanya kritik. Pada bagian penekanan *remedy*, artikel ditutup dengan pernyataan bahwa “masalah harus diperbaiki ke arah yang benar.” Jika kritik yang ada dianggap sebagai suatu masalah, maka hal tersebut harus diperbaiki. Dengan adanya temuan di atas, bingkai yang dibuat oleh penulis artikel ialah menganggap kritik adalah hal yang biasa. Tidak ada tendensi negatif untuk sosok Prabowo maupun peristiwa pengangkatan Prabowo menjadi menteri pertahanan.

Selanjutnya akan dibahas mengenai analisis artikel nomor 3 dan 6 dalam tabel 2.0. Kedua artikel tersebut memiliki tendensi netral. Pada artikel nomor 3 yang diterbitkan oleh BBC pada 24 Oktober 2019 bagian *define problemsnya* ialah mengenai besarnya tugas menteri pertahanan yang harus diemban oleh Prabowo. Di dalam artikel disebutkan *causanya* ialah tugas menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keamanan negara. Pada bagian *moral judgement*, dalam artikel dituliskan bahwa Prabowo dinilai tidak tepat untuk menjadi menteri pertahanan. Namun dalam bagian *remedy*, diselipkan harapan untuk Prabowo agar dapat bekerja dengan baik. Adanya kritik dan harapan untuk Prabowo yang dibangun melalui narasi besarnya tugas menteri pertahanan ini membuat bingkai penelitian ini sebagai kritik dan harapan untuk Prabowo yang bertendensi netral.

Jika artikel nomor 3 mengungkapkan hal negatif serta harapan positif, lain halnya dengan artikel nomor 6. Dalam artikel nomor 6, tendensi yang ada juga bersifat netral. Hanya saja dalam artikel nomor 6 tendensi tersebut dihasilkan dari tulisan dalam artikel yang hanya sekadar bercerita mengenai riwayat pekerjaan Prabowo sebelum menjadi menteri pertahanan. Bahkan tidak ada bagian *remedy* dalam artikel tersebut. Pembingkai yang dilakukan oleh penulis artikel sekadar berfokus pada perjalanan karir Prabowo.

Untuk tujuh artikel selain yang telah kita bahas di atas, seluruhnya memiliki tendensi negatif dengan pembingkai utama yang menolak Prabowo sebagai menteri pertahanan. Dalam tujuh artikel tersebut bagian *define problemsnya* tak jauh dari kritik dan penolakan atas Prabowo. Sebagian besar *causanya* ialah karena Prabowo diduga sebagai pelaku kejahatan HAM di masa lalu. *Cause* yang ada memicu bagian *moral judgement* ketujuh artikel memiliki penilaian moral yang negatif untuk sosok Prabowo. Kemudian hal tersebut bersambung ke dalam bagian *remedy*, di sana terdapat tuntutan

untuk menurunkan Prabowo dari jabatan. Dengan demikian, temuan penelitian ini untuk pemberitaan pengangkatan Prabowo menjadi menteri pertahanan berbingkai SARA pada kurun waktu 21-27 Oktober 2019 yang paling banyak digunakan ialah bingkai *Tolak Prabowo*.

Pembingkaian bertendensi negatif dalam berita politik dengan menggunakan SARA kebanyakan menyerang dan mengekspos sosok individu sebagai minoritas dengan nilai negatif. Sedangkan untuk pembingkaian positif menggunakan isu SARA, individu akan dikaitkan dengan nilai-nilai mayoritas yang dilabeli positif. Hal tersebut ditemukan dalam penelitian Farida & Yoedtadi (2019), Ramasubramanian & Martinez (2017), Mayasari (2017), dan Atmadja (2014). Jika dilihat dari sisi suku, agama, dan ras, Prabowo tergolong dalam kaum mayoritas. Sisi minoritas yang dimiliki oleh Prabowo ialah golongannya sebagai mantan prajurit yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM besar. Maka itu untuk pemberitaan negatif terkait Prabowo selalu menggambarkan Prabowo sebagai sosok mantan prajurit yang diduga terlibat pelanggaran HAM di masa lalu. Layaknya pemberitaan negatif mengenai Obama yang selalu dikaitkan dengan ras kulit hitamnya yang dipandang sebagai minoritas bernilai negatif (Ramasubramanian & Matrinez, 2017).

Pembingkaian dalam berita politik menyangkut nilai positif yang selalu dikaitkan pada kaum mayoritas serta nilai negatif yang disematkan untuk kaum minoritas merupakan hal yang berbahaya. Bagaimana nilai positif yang selalu digaungkan media dalam gambaran kaum mayoritas dalam kancah politik (Farida & Yoedtadi, 2019) dapat memengaruhi pola pikir masyarakat yang mengonsumsi media tersebut. Begitupula dengan pemberitaan minoritas yang cenderung dikaitkan dengan nilai negatif, berpotensi besar untuk memengaruhi pola pikir masyarakat atau konsumen media awam terhadap sosok yang diberitakan (Ramasubramanian & Matrinez, 2017). Pembingkaian berita dengan teknik seperti di atas perlu dihindari oleh media-media besar agar tidak menjerumuskan masyarakat pada pola pikir yang salah. Apalagi disangkut pautkan dengan isu SARA yang sensitif. Identitas SARA seorang politikus baiknya tidak melulu digunakan untuk mengambil maupun menurunkan dukungan. Penggunaan identitas SARA baik oleh politikus itu sendiri maupun media perlu dihilangkan demi mencapai dunia politik yang lebih sehat dan lebih rendah konflik.

## Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini ialah sebagian besar bingkai SARA yang digunakan oleh media terkait pemberitaan Prabowo sebagai menteri pertahanan ialah Tolak Prabowo. Bingkai bertendensi negatif yang menonjolkan bahwa Prabowo adalah terduga pelaku HAM berat di masa lalu terkait kasus Mei 1998 adalah yang paling banyak dipublikasikan. Data tersebut digunakan untuk membuat tulisan yang menyerang dan bertensi negatif untuk sosok Prabowo. Nilai minoritas negatif yang melekat pada identitas Prabowo sebagai golongan mantan prajurit yang diduga pernah terlibat dalam pelanggaran HAM besar menjadi senjata utama yang selalu digunakan oleh media.

## Daftar Pustaka

- Anggoro, A. D. (2014). Media, Politik, dan Kekuasaan: Analisis Framing Model Robert N. Entman tentang Pemberitaan Hasil Pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV ONE dan Metro TV. *Jurnal Aristo*, 2(2), 25-52.  
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/article/view/16>
- Atmadja, X. L. (2014). Analisis *Framing* terhadap Pemberitaan Sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Media Online. *Jurnal E-Komunikasi*, 2(1), 1-11.  
<http://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/1744>
- Entman, R. M. (2004). *Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S. Foreign Policy*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Entman, R. M., & Herbst, S. (2005). Reframing Public Opinion as We Have Known It. Dalam Bennet, W. L., & Entman, R. M, *Mediated Politics* (203-225). New York: Cambridge University Press.
- Eriyanto. (2011). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Farida, L., & Yoedjadi, M. G. (2019). Politik Identitas dalam Pemilihan Presiden 2019 (Analisis Framing Pemberitaan Kampanye Pilpres 2019 pada Medcom.id). *Koneksi*, 3(2), 358-365.  
<https://journal.untar.ac.id/index.php/koneksi/article/view/6395/0>
- Kemhan. (2019). Upacara Serah Terima Jabatan Menteri Pertahanan. Diakses melalui <https://www.kemhan.go.id/2019/10/24/upacara-serah-terima-jabatan-menteri-pertahanan.html>

- Matthes, J. (2012). Framing politics: An integrative approach. *American Behavioral Scientist*, 56(3), 247–259. <https://doi.org/10.1177/0002764211426324>
- Mayasari, S. (2017). Konstruksi Media Terhadap Berita Kasus Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): Analisis Framing Pada Surat Kabar Kompas dan Republik. *Jurnal Komunikasi*, 8(2), 8–18. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jkom/article/view/2528>
- Nasution, H. M., & Aminulloh, A. (2018). Framing Isu Sara Kasus Buni Yani di *Detik.com* dan *Okezone.com*. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 7(2), 20–27. <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1421>
- Ramasubramanian, S., & Martinez, A. R. (2017). News Framing of Obama, Racialized Scrutiny, and Symbolic Racism. *Howard Journal of Communications*, 28(1), 36–54. <https://doi.org/10.1080/10646175.2016.1235519>